



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA  
10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357  
LAMAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [ditjenpk@kkp.go.id](mailto:ditjenpk@kkp.go.id)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN  
NOMOR 14 TAHUN 2025  
TENTANG  
TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, perlu membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1092);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN TENTANG TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN.

- 
- KESATU : Menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan yang selanjutnya disebut Tim PPID DJPK.
- KEDUA : Tim PPID DJPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:
- a. Atasan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK);
  - b. PPID;
  - c. PPID Pembantu, dan
  - d. Sekretariat PPID selaku Petugas Pelayanan Informasi Publik terdiri atas
    1. Koordinator Sekretariat PPID;
    2. Koordinator Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik;
    3. Koordinator Bidang Uji Konsekuensi;
    4. Koordinator Bidang Sengketa Informasi;
    5. Koordinator Bidang Data dan Informasi; dan
    6. Anggota Koordinator,dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KETIGA : Tim PPID DJPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Atasan PPID DJPK
    1. menyusun arah kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
    2. melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
    3. menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik yang Informasinya dikuasai oleh PPID Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan; dan
    4. menyampaikan laporan tahunan layanan informasi publik PPID DJPK kepada atasan PPID Kementerian.
  - b. PPID
    1. melaksanakan arah kebijakan layanan informasi publik yang telah ditetapkan atasan PPID;
    2. menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan informasi publik dengan dukungan anggaran yang memadai;
    3. menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID dalam rangka penyebaran informasi publik;
    4. menugaskan petugas pelayanan informasi publik untuk membantu pelaksanaan tugas PPID;
    5. menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik;
    6. mengonsolidasikan proses pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
    7. mengumpulkan dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi publik;

8. mengumpulkan dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi publik di unit organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
  9. mengoordinasikan pengumpulan seluruh informasi publik;
  10. mengumumkan informasi publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
  11. memberikan dan menyampaikan informasi publik di lingkungan agar berjalan dengan baik;
  12. membantu PPID Kementerian melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
  13. menentukan informasi publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan untuk PPID Unit Organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
  14. membantu PPID Kementerian melakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan;
  15. melakukan pengujian konsekuensi untuk PPID unit organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
  16. membuat mengelola, memelihara, dan memutakhirkan daftar informasi publik;
  17. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik;
  18. menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan layanan informasi publik;
  19. memenuhi permintaan informasi publik dari PPID Kementerian;
  20. melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi petugas pelayanan informasi publik guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
  21. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh PPID Unit Organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan kepada PPID UPT;
  22. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon;
  23. memberikan alasan tertulis atas pengecualian informasi publik dalam hal permintaan informasi publik ditolak;
  24. melakukan penghitaman atau pengaburan materi informasi yang dikecualikan dan memberikan alasannya;
  25. menyusun dan mengusulkan daftar informasi publik dan daftar informasi publik yang dikecualikan untuk PPID Unit Organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan; dan
  26. menyusun laporan layanan informasi publik.
- c. PPID Pembantu membantu PPID melaksanakan tugasnya dalam pengelolaan layanan informasi publik pada Unit Organisasi Eselon II.
- d. Sekretariat PPID selaku Petugas Pelayanan Informasi Publik
1. Koordinator Sekretariat PPID

bertanggung jawab mengoordinasikan sekretariat PPID dengan sekretariat PPID Kementerian dalam pengelolaan informasi dan memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

2. Anggota Sekretariat PPID bertanggung jawab menyiapkan kebutuhan PPID Kementerian dan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik.
3. Anggota Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik.
  - a. Sub Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik Humas dan Pelayanan
    - 1) Koordinator bertanggung jawab mengoordinasikan penyusunan daftar informasi publik di bidang informasi publik, kehumasan, dan pelayanan lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.
    - 2) Anggota membantu koordinator dalam melaksanakan penyusunan daftar informasi publik di bidang informasi publik, kehumasan, dan pelayanan lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.
  - b. Sub Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik Program
    - 1) Koordinator bertanggung jawab mengoordinasikan penyusunan daftar informasi publik di bidang program dan anggaran lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.
    - 2) Anggota membantu koordinator dalam melaksanakan penyusunan daftar informasi publik di bidang program dan anggaran lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.
  - c. Sub Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)
    - 1) Koordinator bertanggung jawab mengoordinasikan penyusunan daftar informasi publik di bidang keuangan dan BMN lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.
    - 2) Anggota membantu koordinator dalam melaksanakan penyusunan daftar informasi publik di bidang keuangan dan BMN lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.
  - d. Sub Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur dan Organisasi
    - 1) Koordinator

-

bertanggung jawab mengoordinasikan penyusunan daftar informasi publik di bidang SDM Aparatur dan Organisasi lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.

- 2) Anggota membantu koordinator dalam melaksanakan penyusunan daftar informasi publik di bidang SDM Aparatur dan Organisasi lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.
- e. Sub Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik Dukungan Manajemen
- 1) Koordinator bertanggung jawab mengoordinasikan penyusunan daftar informasi publik di bidang dukungan manajemen lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.
  - 2) Anggota membantu koordinator dalam melaksanakan penyusunan daftar informasi publik di bidang dukungan manajemen lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.
- f. Sub Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik Peraturan Perundang-undangan
- 1) Koordinator bertanggung jawab mengoordinasikan penyusunan daftar informasi publik di bidang peraturan perundang-undangan lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.
  - 2) Anggota membantu koordinator dalam melaksanakan penyusunan daftar informasi publik di bidang peraturan perundang-undangan lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.
- g. Sub Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik Kerja Sama
- 1) Koordinator bertanggung jawab mengoordinasikan penyusunan daftar informasi publik di bidang kerja sama lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.
  - 2) Anggota membantu koordinator dalam melaksanakan penyusunan daftar informasi publik di bidang peraturan perundang-undangan lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.
- h. Sub Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik Data

- 1) Koordinator bertanggung jawab mengoordinasikan penyusunan daftar informasi publik di bidang data lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.
- 2) Anggota membantu koordinator dalam melaksanakan penyusunan daftar informasi publik di bidang data lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.
- i. Sub Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik Direktorat dan UPT lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan
  - 1) Koordinator bertanggung jawab mengoordinasikan penyusunan daftar informasi publik di Direktorat dan UPT lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.
  - 2) Anggota Membantu koordinator dalam melaksanakan penyusunan daftar informasi publik di Direktorat dan UPT lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.
- 4. Anggota Bidang Uji Konsekuensi
  - a. Koordinator bertanggung jawab mengoordinasikan pelaksanaan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan bersifat rahasia dengan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan yang menguasai dan mengelola informasi tertentu untuk dilakukan pengklasifikasian informasi publik.
  - b. Anggota
    - 1) melaksanakan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan bersifat rahasia dengan pejabat yang menguasai informasi dimaksud di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan; dan
    - 2) mengelola informasi tertentu untuk dilakukan pengklasifikasian informasi publik.
- 5. Anggota Bidang Sengketa Informasi
  - a. Koordinator Bertanggung jawab mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penyelesaian sengketa informasi publik.
  - b. Anggota
    - 1) menyiapkan bahan penyelesaian sengketa informasi publik; dan
    - 2) menyiapkan bahan persidangan sengketa informasi publik;
- 6. Anggota Bidang Data dan Informasi
  - a. Koordinator

bertanggung jawab mengoordinasikan pelayanan informasi satu data yang dikuasai Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan sera diseminasinya.

- b. Anggota Koordinator
- 1) melaksanakan pelayanan informasi satu data yang dikuasai Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan; dan
  - 2) diseminasi informasi satu data Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.

- KEEMPAT : Masa kerja Tim PPID DJPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada anggaran masing-masing unit kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Mei 2025

DIREKTUR JENDERAL  
PENGELOLAAN KELAUTAN,

ttd.

A. KOSWARA

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
Pengelolaan Kelautan,



Miftah Huda

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENGELOLAAN KELAUTAN  
NOMOR 14 TAHUN 2025  
TENTANG  
TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT  
JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL  
PENGELOLAAN KELAUTAN

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
Atasan PPID		
1.	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan	
PPID		
1.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	PPID DJPK
2.	Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang	PPID BKKPN Kupang
3.	Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang	PPID BPSPL Padang
4.	Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar	PPID BPSPL Denpasar
5.	Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak	PPID BPSPL Pontianak
6.	Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar	PPID BPSPL Makassar
7.	Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru	PPID LKKPN Pekanbaru
8.	Kepala Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (LPSPL) Sorong	PPID LPSPL Sorong
9.	Kepala Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (LPSPL) Serang	PPID LPSPL Serang
PPID Pembantu		
1.	Direktur Konservasi Ekosistem	PPID Pembantu DJPK
2.	Direktur Konservasi Spesies dan Genetik	PPID Pembantu DJPK
3.	Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	PPID Pembantu DJPK
4.	Direktur Sumber Daya Kelautan	PPID Pembantu DJPK
5.	Direktur Jasa Bahari	PPID Pembantu DJPK
Sekretariat PPID selaku Petugas Pelayanan Informasi Publik		
1.	Leri Nuriadi, Pranata Humas Muda pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	Koordinator Sekretariat PPID
2.	Kepala Subbagian Umum pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang	Anggota
3.	Kepala Subbagian Umum pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak	Anggota
4.	Kepala Subbagian Umum pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar	Anggota
5.	Kepala Subbagian Umum pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar	Anggota

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
6.	Kepala Subbagian Umum pada Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang	Anggota
7.	Kepala Urusan Umum pada Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (LPSPL) Serang	Anggota
8.	Kepala Urusan Umum pada Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (LPSPL) Sorong	Anggota
9.	Kepala Urusan Umum pada Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru	Anggota
Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik		
Sub Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik Program		
1.	Raden Tomi Supratomo, Perencana Ahli Madya pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	Koordinator Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik Program
2.	Ari Pariyanto, Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	Anggota
Sub Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)		
1.	Ony Satiti, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	Koordinator Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik Pengelolaan Keuangan dan BMN
2.	Mahmud, Pranata Keuangan APBN Mahir pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	Anggota
Sub Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur dan Organisasi		
1.	Dedhy Wibowo Setiawan, Analis Sumber Daya Manusia Ahli Muda pada Koordinator Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik Pengelolaan Keuangan dan BMN	Koordinator Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik SDM Aparatur dan Organisasi
2.	Panggih Prasetyo, Analis Organisasi pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	Anggota
Sub Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik Dukungan Manajemen		
1.	Titus Pramono, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	Koordinator Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik Dukungan Manajemen
2.	Arief Surya Wibowo, Analis Tata Usaha pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	Anggota
Sub Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik Peraturan Perundang-undangan		

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ajar Buditama, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	Koordinator Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik Peraturan Perundang-undangan
2.	Arief Nugroho Riyadi, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	Anggota
Sub Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik Kerja Sama		
1.	Anita Setianingsih, Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	Koordinator Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik Kerja Sama
2.	Airin Melisa Manurung, Analis Kerja Sama pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	Anggota
Sub Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik Kerja Data		
1.	Lantip Wratsangka, Stasisi Muda pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	Koordinator Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik Data
2.	Zia Zulkarnain, Pranata Komputer Pertama pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	Anggota
Sub Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik Humas		
1.	Leri Nuriadi, Pranata Humas Muda pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	Koordinator Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik Humas
2.	Nur Kholis, Analis Humas pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	Anggota
Sub Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik Direktorat dan UPT lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan		
1.	Leri Nuriadi, Pranata Humas Muda pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	Koordinator Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik Direktorat dan UPT lingkup Ditjen PK
2.	Prabowo, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Muda pada Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	Anggota
3.	Fajar Renita Sitinjak, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Muda pada Direktorat Konservasi Ekosistem	Anggota
4.	Denny Bijaksana, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda pada Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Anggota
5.	Rachmad Dian Kuncoro, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda pada Direktorat Jasa Bahari	Anggota
6.	Untung, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Muda pada Direktorat Sumber Daya Kelautan	Anggota
7.	Melody Virginia, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir (BPSPL) Padang	Anggota

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
8.	Kety Intana Janesonia, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak	Anggota
9.	Saraswati Dewi Ariesta, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar	Anggota
10.	Dimas Kris Pratama, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar	Anggota
11.	Riyan Afif Al Ihsan, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama pada Balai Kawasan Konservasi Kawasan Perairan Nasional (BKKPN) Kupang	Anggota
12.	Alyaa Farah Qonitah, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama pada Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (LPSPL) Serang	Anggota
13.	Bagus Luserius, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama pada (LPSPL) Sorong	Anggota
14.	Andriyanto Hanif, Pengelola Edkosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda pada Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru	Anggota
<b>Bidang Uji Konsekuensi</b>		
1.	Ajar Buditama, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	Koordinator Bidang Uji Konsekuensi
2.	Vidyana Frida Yuliani, Pranata Humas Ahli Pertama pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	Anggota
<b>Bidang Sengketa Informasi</b>		
1.	Aimi Solidei Manalu, Analis Hukum Ahli Muda pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	Koordinator Bidang Sengketa Informasi
2.	Nur Kholis, Analis Publikasi pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	Anggota
<b>Bidang Data dan Informasi</b>		
1.	Nur Kholis, Analis Humas pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	Koordinator Bidang Data dan Informasi
2.	Arief Fajar Fitriani, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama pada Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	Anggota
3.	Wildan Kasyfi Zulizar, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama pada Direktorat Konservasi Ekosistem	Anggota
4.	Della Arimurti, Tenaga Teknis Program Prioritas Menteri pada Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Anggota
5.	Rommy Mardianto, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda pada Direktorat Jasa Bahari	Anggota
6.	Mellanie Amelia Dasty Savitri, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama pada Direktorat Sumber Daya Kelautan	Anggota
7.	Tasha Iary, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak	Anggota

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
8.	Yulianti Sri Rejeki, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak	Anggota
9.	Kharisma Khabilillah, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama pada BPSPL Makas Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar	Anggota
10.	Aditya Hidayatullah, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar	Anggota
11.	Andri Yudistira, Perencana Ahli Pertama pada Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang	Anggota
12.	Syifa Hoirunnisa, Arsiparis Pelaksana pada Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (LPSPL) Serang	Anggota
13.	Masrul Jaya, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama pada Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (LPSPL) Sorong	Anggota
14.	Muhammad Faisal Siddiq, Analis Perencanaan pada Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru	Anggota

DIREKTUR JENDERAL  
PENGELOLAAN KELAUTAN,

ttd.

A. KOSWARA

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
Pengelolaan Kelautan,



Miftahul Huda